

PEMAKNAAN HUMANISME PANCASILA DALAM RANGKA PENGUATAN KARAKTER BANGSA MENGHADAPI GLOBALISASI

Oleh:
Slamet Subekti
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro

ABSTRACT

Today Indonesia is facing the challenges of globalization, especially in its cultural dimension has brought the threat to the continuity of national culture. Historically Pancasila ideology has been an integrating force quite steady as a common platform for the nation-state of Indonesia. The existence of Pancasila should be shown again as a public discourse that is open to interpretation in accordance with the demands of the contemporary with the times. Therefore, the meaning of Pancasila humanism necessary in order to strengthen the nation's character in order to face the challenges of globalization.

Keywords: *Pancasila, humanism, Nation's character, Globalization*

I. PENDAHULUAN

Setengah abad yang lalu Presiden Sukarno mengemukakan visi tentang masa depan seluruh bangsa di dunia senantiasa menghadapi gelombang besar peradaban yang tidak terhindarkan. Sehubungan dengan itu diperlukan interpretasi kembali (*reinterpretation*) terhadap nilai inti atau pandangan hidup (*way of life*) kita untuk mengantisipasi tuntutan zaman. Berikut ini petikan pidato beliau pada 1 September 1961 di hadapan Konferensi Negara-negara Nonblok I di Beograd:

"Kita hidup dalam masa yang gegap-gempita, suatu masa yang penuh dengan bahaya. Keadaan ditimbuni dengan kesulitan-kesulitan, namun kita tidak boleh melarikan diri dari kesulitan-kesulitan ini, kita harus mengatasi keadaan itu. Akan tetapi dogma-dogma dari masa lampau yang tenang tidak setara dengan masa sekarang yang membudai. Karena peristiwa kita baru, maka kita harus berpikir kembali, kita

harus bertindak kembali, kita harus membentuk kembali, kita harus membentuk lagi kembali. ...”
(Sukarno, 1985: 104).

Betapa perlunya setiap negara-bangsa mengantisipasi gelombang perubahan zaman menuju tata hubungan dunia baru tetap relevan hingga hari ini. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 26 September 2009 menyatakan misinya dalam pidato bertemakan “*Harmony among Civilization*” di Universitas Harvard bahwa di abad 21 tidak perlu ada perbenturan peradaban atau agama, melainkan masyarakat global bisa mencapai harmoni atau toleransi antarsemua peradaban dan agama (Suara Karya, 24 September 2009). Akhir-akhir ini, Presiden SBY dalam kesempatan menerima pimpinan US ASEAN Business Council di Kantor Presiden pada 7 Juni 2012 menyatakan bahwa pengembangan ekonomi ASEAN pertama-tama harus mempertimbangkan terwujudnya ASEAN yang damai, stabil, dan demokratis. Kedua, harus berkelanjutan dan mempertimbangkan harmoni antarperadaban (<http://www.presidensby.info>).

Dewasa ini bangsa kita menghadapi arus globalisasi dengan dimensi ekonomi, budaya maupun politik. Pertanyaan mendasar pertama, apakah ideologi Pancasila masih relevan dalam masa globalisasi dan demokratisasi yang nyaris tanpa batas? Kedua, bagaimana cara yang dimungkinkan agar pandangan hidup Pancasila dikonstruksikan sedemikian rupa sehingga mampu merespon tantangan global tersebut?

Makalah ini melalui interpretasi filosofis, yakni langkah penafsiran atas kandungan nilai dasar Pancasila secara kontekstual kontemporer, dimaksudkan sebagai usaha untuk mencari jawaban atas pertanyaan tersebut. Pembahasan difokuskan pada pengungkapan nilai humanisme yang implisit terkandung dalam Pancasila sebagai kearifan lokal. Namun demikian dicoba untuk merumuskan kemungkinan humanisme Pancasila dalam rangka penguatan karakter bangsa menghadapi tantangan globalisasi.

II. TANTANGAN GLOBALISASI

Dewasa ini semua negara di dunia terlibat dalam proses globalisasi, yang pada dasarnya dipahami sebagai

suatu proses deteritorialisasi atau lintas-batas. Kita melihat perluasan bentang ekonomi pasar ke dalam pasar global, politik global melampaui batasan negara-bangsa dan konsep modern tentang kedaulatan serta budaya global berlawanan dengan dialektika di antara kebangkitan budaya-budaya lokal. Oleh karena itu, globalisasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses sejarah bercorak deteritorialisasi atau lintas-batas, dimana keinginan manusia secara universal dan ontologis saling terhubung menjadi kesatuan di planet ini, dan sekarang terwujud sebagai pasar bebas global, tatanan politik trans-nasional dan globalisme budaya (Shen, 2010: 72).

Fenomena globalisasi secara historis telah terjadi seribuan tahun yang lalu. Sejak abad 19 dicatat sejumlah peristiwa ketika bangsa Eropa menemukan benua Amerika yang mengakibatkan Imperialisme Eropa, terjadi Revolusi Industri yang ditandai dengan berbagai penemuan transportasi kereta api dan kapal laut, telepon dan telegraf yang menghubungkan dunia. Selanjutnya pada abad 20, pasar bebas Kapitalisme berkembang luas sejak berakhirnya Perang Dingin, dan

penemuan internet sebagai jejaring sosial yang memungkinkan terjadinya pertukaran antarbudaya.

Inilah momen dari sejarah manusia bahwa orang di dunia merasa berdekatan satu sama lain sehingga rawan dan rentan terhadap berbagai macam konflik. Sekarang ini merupakan momen sejarah yang secara kritis mengandaikan sikap terbuka kepada sesama, di samping bertahan dengan menutup-diri. Dalam rangka merespon situasi genting dewasa ini yang penuh dengan konflik yang diciptakan oleh ketertutupan-diri karena keadaan yang berbeda seperti perbedaan ajaran, kebudayaan, politik dan kelompok agama, komunitas bahasa, dan perbedaan wilayah geografis dan peradaban dunia, dan sebagainya; kita selayaknya menjadi lebih peduli kepada sesama dan kemungkinan untuk saling memperkaya.

Pembahasan tentang dimensi globalisasi akan diawali dengan dimensi ekonomi, kemudian dimensi sosial, dan akhirnya dimensi politik. Perekonomian global merupakan sistem dimana transaksi –pertukaran barang dan jasa dengan uang—berlangsung, dalam bentuk perdagangan asing dan

keuangan internasional. Beberapa faktor menjadikan transaksi tersebut lebih rumit ketimbang perekonomian nasional. Faktor-faktor tersebut berkisar pada banyak perbedaan –dalam mata uang, hukum, bahasa, kebiasaan, dan budaya—di antara negara-negara (Gorman, 2009: 277).

Sebuah negara memiliki keuntungan komparatif dalam memproduksi sebuah barang ketika biaya kesempatannya untuk memproduksi barang tersebut lebih rendah daripada negara lainnya. Sebuah negara memiliki keuntungan absolut ketika negara itu dapat menghasilkan barang yang lebih murah daripada yang dapat dilakukan negara lainnya. Keuntungan komparatif, bukan keuntungan absolut, menentukan barang yang mana yang suatu negara seharusnya ekspor dan impor.

Sebuah negara seharusnya mengekspor barang-barang dimana negara itu memiliki keuntungan komparatif dan mengimpor barang-barang yang memiliki ketidakuntungan komparatif, secara langsung (*vis-a-vis*) dengan negara lainnya. Sementara beberapa argumen yang menentang perdagangan bebas terdengar masuk

akal, argumen yang lainnya sekedar dalih bagi adanya proteksionisme oleh mereka yang paling diuntungkan oleh adanya pembatasan impor. Selama lebih dari 25 tahun terakhir, kebijakan perdagangan telah menjadi lebih liberal di seluruh dunia, dan para ekonom berharap tren ini terus berjalan.

Kesepakatan perdagangan mengatur perdagangan internasional antara dua atau lebih negara. Sebuah kesepakatan mungkin mencakup seluruh impor dan ekspor, kategori barang-barang tertentu, atau sebuah kategori tunggal. Amerika Serikat saat ini terlibat dalam sekitar 320 kesepakatan perdagangan dengan berbagai negara. Akan tetapi beberapa kesepakatan perdagangan umum telah berpengaruh pada kebijakan perdagangan dalam tingkatan luas (Gorman, 2009: 290).

Kesepakatan perdagangan umum paling penting disebut Kesepakatan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan (GATT) yang ditandatangani pada Oktober 1947 untuk meliberalkan perdagangan, untuk menciptakan sebuah organisasi untuk mengelola kesepakatan perdagangan yang lebih liberal, dan untuk

menetapkan sebuah mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan dagang. Organisasi GATT kecil dan terletak di Jenewa. Lebih dari 110 negara telah menandatangi kesepakatan umum, yang awalnya ditandatangi oleh 24 negara, termasuk Amerika Serikat. Hingga tingkatan yang lebih luas, peran GATT sebagai sebuah organisasi telah dilampaui oleh Organisasi Dagang Dunia (WTO).

Sejak GATT ditandatangi, beberapa “putaran” berisi pembicaraan untuk meliberalkan perdagangan telah dilangsungkan. Dianggap paling signifikan adalah putaran Kennedy, yang pada akhirnya mendorong pada pengurangan sebesar sepertiga dalam tarif, dan lebih belakangan lagi, putaran Uruguay. Putaran Uruguay membahas halangan umum bagi perdagangan dan masalah yang relatif baru seperti hak properti, praktik penangkapan ikan, dan kepedulian lingkungan.

Tren utama dalam 25 tahun terakhir merupakan masa pembentukan dan pertumbuhan zona perdagangan bebas di antara negara-negara yang sepakat untuk membentuk blok perdagangan regional. Kesepakatan-kesepakatan yang menciptakan zona

perdagangan bebas semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu: untuk meliberalkan perdagangan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menyediakan akses yang sebanding terhadap pasar di antara negara-negara anggota. Zona perdagangan bebas yang paling signifikan adalah Uni Eropa (EU), Kesepakatan Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA), dan ASEAN (Gorman, 2009: 291).

Selain itu, Organisasi Dagang Dunia (WTO) merupakan organisasi perdagangan global, yang bermekars di Jenewa, untuk menangani perdagangan antara negara-negara. Didirikan pada Januari 1995 melalui perundingan putaran Uruguay dalam GATT, WTO terdiri dari 144 negara hingga Januari 2002. WTO mengatur kesepakatan perdagangan, menyediakan forum untuk perundingan dagang dan penyelesaian perselisihan dagang, mengawasi kebijakan dagang, dan menyediakan bantuan teknis dan pelatihan bagi negara berkembang.

Globalisasi lebih dari sekedar perpindahan barang-barang seperti Nike, Coca Cola dan MacDonald's, melainkan juga perpindahan budaya. Pakaian, musik, film dan televisi

merupakan bagian dari dimensi sosial kehidupan kita. Nyaris globalisasi telah mempengaruhi pilihan kita dalam empat hal tersebut (Perry-Globa et.al., 2007: 15).

Tren pakaian di kalangan gadis Generation Y tahun 2005 meliputi *low-cut* jeans dan T-shirts dengan slogan provokatif. Perempuan ABG di Edmonton, London, dan Hongkong semua meniru pakaian yang dikenakan bintang pop dalam musik video yang mereka lihat hari majalah internasional ABG. Pada 2005, laki-laki ABG di Tokyo, Rio de Janeiro, dan Calgary merespon pengaruh media global.

Hampir sebagian anak muda mendengarkan musik ciptaan artis internasional seperti Green Day (AS), Him (Finlandia), Bjork (Islandia) atau Kati Melua (Georgia) dan mengunduh musik dari Internet. Globalisasi jaringan komputer berarti kita bisa mendapatkan musik dengan mudah baik dari Afrika Selatan maupun Kanada. Beberapa di antara kita membeli CD di toko musik, di samping membeli CD dengan pembayaran virtual di belahan dunia mana pun. Banyak orang di dunia menunjukkan

persamaan terpengaruh musik global seperti Lady Gaga.

Kita telah terbiasa melihat film buatan Hollywood (AS), “Bollywood” (India) atau Anime (Jepang) semua sangat popular di AS, Kanada dan negara-negara lain. Hal ini menunjukkan betapa globalisasi juga mempengaruhi pembuatan film. Misalnya, kesuksesan film *The Raider* yang dibuat di Indonesia dengan keterlibatan bintang film dan sutradara dari luar negeri berhasil mendulang keuntungan finansial yang besar sekali.

Namun demikian globalisasi budaya dapat dipandang sebagai Imperialisme Budaya, karena yang terjadi dominasi satu kebudayaan terhadap kebudayaan lain. Hal ini tampak jelas dengan kehadiran MacDonald’s, Disneyland, dan Starbucks di berbagai penjuru negara. Bersamaan dengan itu dominasi bahasa Inggris sehingga terjadi invasi terhadap bahasa-bahasa lain. Kiranya perlu dipertanyakan secara kritis, benarkah semua orang di seluruh dunia ini mempunyai selera yang sama?

Teknologi informasi seperti televisi, radio, dan Internet telah memutus selera ikatan-ikatan budaya

kita. Menurut Daniel Yergin pemenang Pulitzer Price bahwa akses yang lebih besar pada televisi dan Internet telah menciptakan suatu “tenunan dunia”. Televisi khususnya telah masuk ke dalam rumah kita, dan sulit untuk menghindarinya. Para antropolog menunjukkan dampak televisi terhadap kebudayaan, yaitu ketika orang melihat televisi, mereka gagal berpartisipasi (dan menopang) kebudayaan yang hidup di sekitarnya dengan risiko generasi yang dibesarkan layar televisi akan kehilangan aspek kritis atas kebudayaannya.

Gelombang demokrasi yang berlangsung sejak akhir 1980an telah mengakibatkan keruntuhan rejim-rejim sosialis-komunis di Uni Soviet dan Eropa Timur itu berbarengan dengan meningkatnya globalisasi seakan-akan membuat ideologi semakin tidak relevan dalam dunia yang kian tanpa batas. Akan tetapi, sebagaimana diketahui bahwa globalisasi mengandung banyak ironi dan kontradiksi. Pada satu pihak, globalisasi mengakibatkan kebangkrutan banyak ideologi –baik universal maupun lokal—tetapi pada lain pihak, nasionalisme lokal bahkan

dalam bentuknya yang paling kasar, semacam *ethno-nationalism* dan bahkan *tribalism* justru menunjukkan gejala peningkatan. Gejala terakhir ini sering disebut sebagai penyebab “Balkanisasi”, yang terus mengancam integrasi negara-bangsa yang majemuk dari sudut etnis, sosio-kultural, dan agama seperti Indonesia (Azra, 25 Maret 2008).

Globalisasi politik dapat mempengaruhi lebih dari sekedar usaha humanitarian, bahkan mempengaruhi bentuk pemerintahan suatu negara. Demokrasi merupakan contoh ide politik yang telah menyebar-luas dari satu negara ke negara lain selama berabad-abad. Bagi pendukungnya percaya bahwa demokrasi akan meningkatkan standar kehidupan rakyat dan memperbaiki etika pemerintahan. Mereka percaya bahwa demokrasi dapat membawa kebebasan warga, seperti kebebasan untuk memilih pemerintahan, kebebasan untuk membuat pilihan-pilihan personal, kebebasan dari kontrol pemerintah. Pada 2005, 118 negara (dari 193 negara di dunia) telah menganut demokrasi elektoral.

Adopsi demokrasi secara gradual oleh banyak negara ini merupakan bentuk globalisasi. Sebagaimana banyak masyarakat yang mengekspresikan ide-ide politiknya kepada masyarakat lain sehingga mengadopsi beberapa ide tersebut. Sebagian besar masyarakat melakukan modifikasi ide-ide politiknya untuk disesuaikan dengan sejarah, tradisi, agama, geografi, dan perkembangan ekonominya. Misalnya, gerakan politik di Timor Timur pada 2002 berhasil melakukan perubahan politik berkat globalisasi media dan teknologi informasi (Perry-Globa, 2007: 22).

Demikian gambaran globalisasi sebagai proses yang mempertemukan berbagai negara di dunia dalam interaksi ekonomi, politik, dan budaya. Namun demikian proses globalisasi bukan hanya membawa keuntungan berkat kerjasama ekonomi dan peluang kerja yang lebih besar. Akan tetapi, globalisasi juga membawa kerugian serius seperti semakin lebarnya jurang antara negara kaya dan negara miskin, dominasi perdagangan global oleh negara-negara kaya, kurangnya peluang negara miskin terhadap akses pasar, kerusakan lingkungan hidup dan

sumber daya tak-terbarukan, eksloitasi tenaga kerja semakin besar terutama perempuan dan anak-anak, serta ancaman terhadap kelangsungan budaya lokal maupun nasional.

Berdasarkan kesadaran bahwa globalisasi terutama dalam aspek budaya membawa ancaman serius terhadap kelangsungan budaya lokal maupun nasional, maka diperlukan langkah antisipasi terhadap ancaman tersebut. Usaha strategis perlu dilakukan dengan pengkajian kembali terhadap inti budaya atau *way of life* bangsa kita, yaitu Pancasila. Pengkajian kembali terhadap nilai-nilai keutamaan (*virtue values*) Pancasila ini perlu dilakukan dalam tataran filosofis yang berjangkar pada pemaknaan humanisme Pancasila.

III. PEMAKNAAN HUMANISME PANCASILA

Dalam konteks globalisasi dan interaksi dialogis di antara peradaban ini akan didiskusikan tantangan dan kemungkinan bagi ideologi Pancasila. Di samping itu, akan dikemukakan ide-ide berfokus pada filsafat Pancasila.

Proses globalisasi dikembangkan oleh teknologi

komunikasi dan diterapkan dalam level ekonomi, politik dan budaya, yang membawa manusia ke dalam jejaring yang lebih sistematis. Situasi kehidupan dalam jejaring demikian secara eksistensial dijadikan contoh ontologis tentang hubungan dinamis yang sejak lama telah diteguhkan oleh Pancasila. Konsep “kemanusiaan yang adil dan beradab” dalam Pancasila mengacu pada hubungan internal antara manusia dan segenap ciptaan di alam semesta. Dalam rasio “kemanusiaan yang adil dan beradab”, manusia dapat dipengaruhi oleh serta merespon sesamanya dan dengan tindakan “manusia susila” mereka dapat meluaskan bentang eksistensinya menuju realitas eksistensi yang lebih luas dari diri sendiri kepada sesama, keluarga, komunitas sosial, negara, semua yang berada di alam semesta, yang sekarang ini diterjemahkan dengan term globalisasi.

Gelombang demokratisasi juga melanda Indonesia berikutan dengan krisis moneter, ekonomi dan politik sejak akhir 1997 telah berimbang pada Pancasila sebagai basis ideologi (*common platform*) dan identitas nasional bagi negara-bangsa Indonesia

yang plural seolah kehilangan relevansinya. Menurut Azyumardi Azhra (2008) terdapat setidaknya tiga faktor yang membuat Pancasila semakin sulit dan marginal dalam semua perkembangan yang terjadi. Pertama, Pancasila terlanjur tercemar karena kebijakan rejim Soeharto yang menjadikan Pancasila sebagai alat politik untuk mempertahankan status quo kekuasaannya. Rejim Soeharto juga mendominasi pemaknaan Pancasila yang selanjutnya diindoktrinasikan secara paksa melalui Penataran P4.

Kedua, liberalisasi politik dengan penghapusan ketentuan oleh Presiden BJ Habibie tentang Pancasila sebagai satu-satunya asas setiap organisasi. Penghapusan ini memberikan peluang bagi adopsi asas-asas ideologi lain, khususnya yang berbasiskan agama. Pancasila jadinya cenderung tidak lagi menjadi *common platform* dalam kehidupan politik. Ketiga, desentralisasi dan otonomisasi daerah yang sedikit banyak mendorong penguatan sentimen kedaerahan, yang jika tidak diantisipasi bukan tidak bisa menumbuhkan sentimen *local-nationalism* yang dapat tumpang tindih

dengan *ethno-nationalism*. Dalam proses ini, Pancasila kian kehilangan posisi sentralnya.

Kecenderungan bahwa posisi Pancasila semakin sulit, cukup memberikan peringatan akan masa depan Indonesia yang tetap terintegrasi. Pancasila meskipun menghadapi ketiga masalah tersebut, tetap merupakan kekuatan pemersatu (*integrating force*) yang relatif masih utuh sebagai *common platform* bagi negara-bangsa Indonesia. Sementara itu, kekuatan-kekuatan pemersatu lainnya, terutama birokrasi kepemerintahan Indonesia telah mengalami kemerosotan signifikan. Liberalisasi politik yang menghasilkan fragmentasi elit politik telah menghalangi kemunculan kepemimpinan nasional pemersatu, corak kepemimpinan *solidarity maker* yang dapat mencegah disintegrasi tetap belum tampil.

Kiranya tidak ada yang salah dengan Pancasila itu sendiri. Kekeliruan terjadi karena membuat pemaknaan tunggal atas Pancasila yang kemudian dipaksakan sebagai alat politik untuk mempertahankan status-quo kekuasaan. Oleh karena tidak ada masalah dengan Pancasila, maka tidak

pada tempatnya mengesampingkan Pancasila atas dasar perlakuan pemerintah Orde Baru. Karena posisi Pancasila yang krusial seperti itu, dipandang urgensi untuk dilakukan pemaknaan Pancasila berdasarkan prinsip dasar kemanusiaan atau humanisme.

Pembahasan tentang humanisme Pancasila ini didasarkan pada kajian Prof. Soerjanto Poespawardojo, pakar filsafat dari UI; dan Prof. Franz Magnis-Suseno, pakar filsafat dari STF Driyarkara.

Sebagaimana ditegaskan oleh Soerjanto Poespawardojo, bahwa Pancasila sebagai ideologi negara menyatakan bahwa kelima sila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan prinsip dasar serta pedoman bagi bangsa Indonesia dan hidup kenegaraannya. Usaha menangkap kepadatan serta bobot ketetapan tersebut, sewajarnya diadakan penelitian tentang kekayaan yang terkandung di dalamnya dan

dicoba memahaminya dengan mengungkapkan nilai-nilai serta hubungan antarnilai dan antarsila dalam bentuk-bentuk yang lebih eksplisit. Hal ini berarti bahwa terlebih dahulu harus dipelajari filsafat yang melatarbelakangnya, yang disebut *Filsafat Pancasila* (Poespawardojo, 1991: 54).

Suatu rumusan hanya dapat dipahami dan dengan demikian memperlihatkan fungsinya apabila dikaitkan dengan jalan serta alam pikiran pelaku (pengembang) yang merumuskannya dan lebih-lebih kalau dikaitkan dengan penghayatan eksistensial, dimana rumusan tersebut merupakan motif dasar berbagai bentuk tindakannya. Secara fenomenologis dapat dikatakan bahwa kelima sila itu berlaku bagi setiap manusia. Pada dasarnya tidak seorang pun dapat dilepaskan dari kelima sila tersebut tanpa risiko menyalahi kemanusiaannya, meskipun berdasarkan kemerdekaan yang dimilikinya sebagai hak asasi ia mampu berbuat berlawanan dengan sila-sila itu, namun secara etis tetap terikat untuk menaatinya. Kesadaran akan kenyataan ini dengan sendirinya mengaitkan kelima sila sebagai

keseluruhan nilai dengan kodrat manusia, maka disebut *Humanisme Pancasila*.

Kelima sila merupakan unsur konstitutif kodrat manusia dan inheren padanya. Kodrat manusia di sini adalah keseluruhan struktur, dinamika serta perwujudan yang kesemuanya mengungkapkan realitas manusia *qua talis*. Oleh karena itu, Pancasila mencerminkan nilai-nilai kodrati yang fundamental sifatnya, dan bukan sekedar perwujudan kongkret yang mengungkapkan kode-kode atau kebiasaan sehari-hari. Dengan perkataan lain, Pancasila merupakan eksplisitasi pribadi manusia sebagai *totalitas* yang mengandung berbagai antinomi dalam dirinya antara individualitas dan sosialitas, materialitas dan spiritualitas, transendensi dan immanensi, eksteriorisasi dan interiorisasi, yang tidak dilihat secara sektoral dalam salah satu aspek kehidupannya, tetapi secara integral dengan mengikutsertakan dan memperhatikan segala segi yang membentuk keutuhan pribadi manusia dan segala yang mempengaruhinya, termasuk problematika yang ditimbulkan oleh antinomi tersebut.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengungkapkan dimensi vertikal sebagai pendasaran metafisis keberadaan manusia. Dalam kesadarannya manusia insyaf akan dirinya yang serba terbatas. Sila ini merupakan pengakuan bangsa Indonesia akan *Nilai Absolut* yang menjadi sumber segala realitas, jadi bukan hanya sebagai pengertian yang abstrak belaka, melainkan sungguh-sungguh sebagai realitas kongkret. Tuhan adalah kekuasaan tertinggi yang transenden yang merupakan tujuan akhir segala sesuatu yang ada, dan merupakan pendasaran metafisis segala relasi yang dimiliki manusia (Poespawardojo, 1999: 76-77).

Pemahaman Franz Magnis-Suseno terhadap rumusan sila pertama ini buah kesepakatan *the founding fathers* tentang arti penting agama bagi bangsa Indonesia, bahwa kita tidak membeda-bedakan antara agama-agama. Oleh karena itu, sila pertama Pancasila mewajibkan pluralisme dalam arti pengakuan terhadap adanya keyakinan-keyakinan religius yang berbeda, yang semuanya dilindungi. Keagamaan (*religiosity*) yang didukung oleh

Pancasila adalah keagamaan yang terbuka (Magnis-Suseno, 2012: 10).

Sila Kemanusiaan mempunyai pengertian bahwa komunikasi antar manusia di semua tingkat yang “manusiawi” serta hubungan antar manusia senantiasa adil. Dalam arti ini, kebaikan apa pun apabila tidak adil itu tidak baik, dan perbuatan yang tidak adil tidak pernah benar. Demikian pula makna beradab mengandaikan tuntutan paling dasar Pancasila agar manusia membawa diri selalu secara beradab. Sebaliknya, kelakuan yang tidak beradab tidak pernah bisa benar.

Sila persatuan Indonesia mengandaikan agar kita semua bukan hanya hidup bagi kebahagiaan privat kita dan keluarga, melainkan kita merasa solider senasib sepenanggungan dengan seluruh bangsa. Etika keutamaan dari sila ketiga ini mengharapkan kita mampu untuk mencintai bangsa dan negara kita, dan bersedia berkurban baginya.

Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusuwaratan/perwakilan ini dilatar-belakangi kehendak agar bangsa Indonesia merdeka menjadi demokratis, dan tidak jatuh ke tangan feudal lagi.

Akan tetapi nilai keutamaan kerakyatan ini bukan sekedar perasaan bersatu dengan rakyat, melainkan tekad bahwa nasib bangsa dan kebijakan politik negara benar-benar ditentukan oleh rakyat, bukan oleh elit. Oleh karena itu, sila keempat ini menolak segala sistem diktatorial, paternalistik dan bentuk lain kekuasaan elit di atas rakyat.

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan pernyataan resmi bahwa bangsa ini harus dibangun dalam solidaritas. Bangsa ini pun tidak boleh terpecah secara vertikal, antara mereka yang terus maju dan mereka yang tidak mempunyai harapan. Nilai keutamaan sila ini adalah pengharaman atas korupsi, karena korupsi merupakan penyakit paling berbahaya yang membusukkan tubuh bangsa dan merusak kemampuannya. Pada hakikatnya korupsi bertentangan dengan keadilan sosial.

Ideal manusia menurut Pancasila adalah manusia yang secara otentik berhasil memanusiakan dirinya dalam hubungannya dengan ketiga faktor esensial, yaitu dunia, sesama (masyarakat) dan prinsip ketuhanan. Berdasarkan perspektif Pancasila, perkembangan tidak cukup

dilaksanakan dalam salah satu dari ketiga dimensi tersebut, karena penekanan satu dimensi dengan mengabaikan dimensi lain berarti ekstremitas yang berbahaya bagi masyarakat. Dunia, sesama (masyarakat) dan prinsip ketuhanan adalah lingkungan yang sama esensial dan fundamentalnya bagi perkembangan manusia, maka hubungan terhadap ketiganya serta peningkatannya harus berjalan secara seimbang.

Pemaknaan humanisme Pancasila ini dapat dipandang sebagai usaha untuk membawa kembali Pancasila sebagai wacana publik (*public discourse*). Pengembalian Pancasila sebagai wacana publik merupakan tahap awal krusial untuk pengembangan kembali Pancasila sebagai ideologi terbuka, yang dapat dimaknai secara terus-menerus sehingga tetap relevan dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Pada gilirannya, pembudayaan humanisme Pancasila akan berkontribusi bagi penguatan karakter bangsa dalam rangka tata hubungan peradaban global.

IV. ARTI PENTING PENGUATAN KARAKTER BANGSA DI ERA GLOBALISASI

Pada dasarnya, humanisme Pancasila dapat berkontribusi pada proses globalisasi dengan pandangan hidupnya sebagai suatu proses perluasan bentang etika, terutama dengan nilai-nilai keutamaan Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dalam rangka jejaring yang dikembangkan globalisasi, jika manusia ingin menjunjung tinggi harkat kehidupannya sebagai manusia, mengandaikan hubungan orang dengan sesamanya berdasarkan ketulusan dan khususnya berkaitan dengan keutamaan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

Kesediaan untuk melampaui kepentingan diri sendiri dan bermurah-hati kepada sesama dipandang sebagai keutamaan yang sangat diperlukan dalam proses globalisasi. Dalam konteks Pancasila, nilai keutamaan kemanusiaan yang adil dan beradab dapat dipandang sebagai keutamaan yang mendasar. Kajian tentang Pancasila yang berkaitan dengan dinamisme dan batasan nilai keutamaan

“kemanusiaan yang adil dan beradab” serta implikasinya sebagai suatu etika keugaharian.

Menurut Franz Magnis-Suseno bahwa kita mempunyai etika nasional yang dirumuskan dalam Pancasila. Etika Pancasila bukan hanya rumusan yang indah, melainkan merupakan prasyarat agar bangsa Indonesia bisa maju bersama, dalam damai, kesejahteraan dan solidaritas. Beliau mencoba untuk merumuskan etika Pancasila dalam lima pedoman yang mudah dimengerti oleh masyarakat (Magnis-Suseno, 2012: 11). Kelima pedoman tersebut adalah:

1. Tak boleh ada tekanan, ancaman atau paksaan dalam hal agama.
2. Dalam situasi apa pun kita bertindak secara beradab.
3. Kita maju dan kita maju bersama.
4. Mari kita sukseskan demokrasi kita, dan
5. Mari kita dahulukan mereka yang miskin dan lemah agar dapat hidup secara manusiawi.

Nilai keutamaan kemanusiaan yang adil dan beradab ini menjadi pusat bagi pembangunan karakter manusia Indonesia, yang mampu meluaskan bentang komitmen etisnya pada bangsa dan negara, nilai demokrasi, dan perilaku hidup keadilan sosial, serta meningkatkan bentang spiritualitasnya sebagai insan religius. Pembangunan karakter ini mengacu pada watak, tabiat, akhlak atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebijakan (*virtues*) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Kebajikan terdiri atas sejumlah nilai, moral, dan norma, seperti jujur, berani bertindak, dapat dipercaya, dan hormat kepada orang lain. Interaksi seseorang dengan orang lain menumbuhkan karakter masyarakat dan karakter bangsa. Oleh karena itu, pengembangan karakter bangsa hanya dapat dilakukan melalui pengembangan karakter individu (Hasan et.al., t.t.: 3).

Akan tetapi, karena masyarakat hidup dalam lingkungan sosial dan budaya tertentu, maka pengembangan karakter individu hanya dapat dilakukan dalam lingkungan sosial dan

budaya yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa pengembangan budaya dan karakter bangsa hanya dapat dilakukan dalam suatu proses pendidikan yang tidak melepaskan peserta didik dari lingkungan sosial, budaya masyarakat, dan budaya bangsa. Lingkungan sosial dan budaya bangsa kita adalah Pancasila, jadi pendidikan budaya dan karakter bangsa harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Sekiranya diperlukan referensi banding dapat diacu program pendidikan karakter yang diterapkan di lingkungan sekolah North Carolina dengan mendasarkan pada delapan aspek: (1) Berani, (2) Pertimbangan yang baik, (3) Integritas, (4) Keramah-tamahan, (5) Ketangguhan, (6) Respek, (7) Tanggung-jawab, dan (8) Disiplin diri (Mike et.al., 2002:15). Sementara itu, Kementerian Pendidikan Nasional merumuskan delapan belas aspek karakter: (1) Religius, (2) Jujur, (3) Toleransi, (4) Disiplin, (5) Kerja keras, (6) Kreatif, (7) Mandiri, (8) Demokratis, (9) Rasa ingin tahu, (10) Semangat kebangsaan, (11) Cinta tanah air, (12) Menghargai prestasi, (13) Bersahabat/komunikatif, (14) Cinta damai, (15) Gemar membaca, (16)

Peduli lingkungan, (17) Peduli sosial, dan (18) Tanggung-jawab. Sejumlah delapan belas aspek karakter tersebut dimungkinkan untuk mengurangi atau menambahi, tetapi diharapkan lima nilai berikut ini dikembangkan pada setiap sekolah: (1) Nyaman, (2) Jujur, (3) Peduli, (4) Cerdas, dan (5) Tangguh/kerjakeras (Hasan et.al., t.t.: 9-10).

Pada intinya, mendidik budaya dan karakter bangsa adalah mengembangkan nilai-nilai Pancasila pada diri peserta didik melalui pendidikan paripurna yang mencakup aspek hati, otak, dan fisik. Pendidikan budaya dan karakter bangsa dimaksudkan untuk mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa pada diri peserta didik sehingga mereka memiliki nilai dan karakter sebagai karakter dirinya, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya sebagai anggota masyarakat dan warganegara yang religius, nasionalis, produktif dan kreatif. Oleh karena itu, pembangunan karakter bangsa sangat strategis bagi keberlangsungan dan keunggulan bangsa di masa depan. Ringkasnya, di era globalisasi ini mensyaratkan penguatan karakter

bangsa dalam rangka interaksi antar-budaya, antar-peradaban dan antar-regional.

V. SIMPULAN

Ideologi Pancasila secara historis merupakan kekuatan pemersatu yang cukup mantap sebagai *common platform* bagi negara-bangsa Indonesia. Keberadaan Pancasila perlu ditampilkan kembali sebagai wacana publik yang terbuka bagi pemaknaan kontemporer sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Oleh karena itu, pemaknaan humanisme Pancasila diperlukan dalam rangka penguatan karakter bangsa dalam rangka menghadapi tantangan globalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Azra, Azyumardi, 25 Maret 2008, “Pancasila di Tengah Peradaban Dunia: Perspektif Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural” semula makalah Round Table Discussion pada Lemhanas. Dapat diakses pada WWW.SETNEG.GO.ID

Frye, Mike et.al. (Ed.), 2002, *Character Education Informational Handbook and Guide*, Raleigh: North Carolina Character Education Department of Public Instruction. Dapat diakses pada www.ncpublicschools.org

Gorman, Tom, 2009. *The Complete Ideal's Guide: Economics*, Dialihbahasakan oleh Arif Rakhman, Jakarta: Prenada.

Hasan, Said Hamid et.al., t.t., *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional.

Magnis-Suseno, Franz. “Etika Bangsa Berbudaya di Abad ke-21: Keharusan Kalau Indonesia Mau Maju” makalah pada *Seminar Nasional Membangun Karakter Bangsa melalui Pemantapan Kebudayaan Nasional dan Kesadaran Historis* diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, Semarang, 30 Mei 2012.

Perry-Globa, Pamela, Peter Weeks, Victor Zeleski, David Yoshida and Jill Colyer, 2007. *Perspectives on Globalization*, Toronto: Oxford University Press.

Poespowardjo, Soerjanto, 1991, *Filsafat Pancasila: Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*, Jakarta: Penerbit PT Gramedia kerjasama Lembaga Pengkajian Strategi dan Pembangunan.

Shen, Vincent, 2010. “Globalization and Dialogue of Civilizations – Rethinking Confucian Philosophy” dalam *Culture and Philosophy*, A Journal for Phenomenological Inquiry, Washington D.C.: The Council for Research in Values and Philosophy.

Sukarno, 1985. *Pancasila dan Perdamaian Dunia, Sebuah Kumpulan Pidato*, Jakarta: Inti Idayu Press – Yayasan Pendidikan Sukarno.

Suara Karya, 24 September 2009, “Presiden Serukan Harmoni Antarperadaban Global”.

“Pengembangan Ekonomi ASEAN Harus Pertimbangkan Stabilitas” dapat diakses pada <http://www.presidensby.info>